BAB II
KONSEP EKSPLANASI ILMU EKONOMI KONVENSIONAL DAN ASUMSI *HOMO ECONOMICUS*

A. Eksplanasi Deduktif Nomologis

Dalam bab pendahuluan telah disinggung, bahwa menurut Dietrich dan List, ilmu ekonomi konvensional menjelaskan fenomena perilaku ekonomi dengan mengasumsikan kondisi mental tertentu, berupa keyakinan atau preferensi kepada pelaku ekonomi, dan mengasumsikan bahwa pelaku ekonomi itu rasional, di mana, eksplanasinya biasanya menggunakan modus "jika-maka".[33]

Dapat dipahami, bahwa dalam konsep eksplanasi ilmu ekonomi konvensional, fenomena perilaku ekonomi dipandang sebagai akibat dari kondisi mental tertentu yang kita asumsikan ada pada pelaku ekonomi yang kita analisis perilakunya.

Pada dasarnya, eksplanasi ilmu ekonomi mengikuti skema eksplanasi deduktif nomologis. Menurut Hempel, eksplanasi deduktif nomologis merupakan eksplanasi deduktif di

[33] Franz Dietrich dan Christian List, *Mentalism Versus Behaviourism,,,* h. 249-250.

bawah hukum umum. Secara terminologi, akar kata *"nomologis"* berasal dari bahasa Yunani *"nomos"* yang berarti hukum. Hempel mengatakan bahwa dalam eksplanasi deduktif nomologis, hukum umum yang digunakan dalam eksplanasi ilmiah disebut dengan *covering law* untuk fenomena eksplanandum, dan argumen eksplanatori akan disebut sebagai eksplanandum di bawah hukum tersebut.[34]

Konsep eksplanasi deduktif nomologis tersebut digambarkan oleh Hempel dengan skema berikut:[35]

$$\text{D-N}\quad \left.\begin{array}{l} L_1, L_2, \ldots L_n \\ C_1, C_2, \ldots C_n \end{array}\right\} \text{Kalimat eksplanan}$$

$$\overline{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad}$$

$$\text{E} \qquad\qquad\qquad\qquad \text{Kalimat Eksplanandum}$$

Dimana, L adalah hukum (*law*), C adalah kasus (*case*), dan E adalah peristiwa (*event*). Himpunan premis L dan C yang juga disebut dengan kalimat eksplanan tersebut, kemudian disimpulkan dalam kesimpulan deduktif nomologis yang

[34] Carl G. Hempel, *Philosophy of Natural Science*, (Eglwood Cliffs: Prentice-Hall Inc. 1966), h. 51.

[35] Carl G. Hempel, *Philosophy of Natural Science*,,, h. 50.

dilambangkan dengan E, yang juga disebut sebagai eksplanandum.

Himpunan premis yang disebut dengan kalimat eksplanan itulah yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan deduktif nomologis. Jadi, tanpa adanya pernyataan hukum umum dan pernyataan kasus partikular kita tidak dapat menarik kesimpulan deduktif nomologis. Pada dasarnya, bentuk eksplanasi tersebut mengikuti bentuk penalaran yang ada dalam logika formal, yaitu mengikuti penalaran modus ponens sebagai berikut:

$\mathbf{P \rightarrow Q}$

$\mathbf{Q \vdash P}$

Cara kerja eksplanasi deduktif nomologis tersebut nampak sangat sederhana dan tidak asing dalam kehidupan sehari-hari kita, yang mungkin tanpa sadar kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana eksplanasi deduktif nomologis tersebut dalam bidang yang lebih umum adalah sebagai berikut:

Semua manusia mati

Somad adalah manusia

Somad pasti mati

Pernyataan bahwa “semua manusia pasti mati” merupakan pernyataan hukum umum, sedangkan pernyataan “Somad adalah manusia” merupakan pernyataan kasus partikular. Dua himpunan kalimat pernyataan ini disebut dengan kalimat eksplanan. Sedangkan, pernyataan “Somad pasti mati” merupakan kesimpulan yang ditarik sebagai konsekuensi logis dari hukum umumnya, yang disebut dengan kalimat eksplanandum.

Adapun dalam penalaran deduktif nomologis, eksplanasi diungkapkan terkadang juga diungkapkan dalam bentuk eliptik, yaitu dengan tidak menyebut secara eksplisit kalimat hukumnya, yang bukan berarti bahwa premis hukumnya tidak ada. Eksplanasi eliptik tersebut diungkapkan dalam bentuk E karena C. E merupakan peristiwa yang dieksplanasikan, dan C merupakan beberapa anteseden atau serangkaian situasi.

Misalnya, pernyataan “lumpur salju di trotoar tetap mencair selama terjadi pembekuan, karena sudah ditaburi garam”. Eksplanasi tersebut tidak secara eksplisit menyebut hukum tertentu, tapi sebenarnya mengimplisitkan satu hukum

bahwa titik beku air menurun ketika garam larut di dalamnya.[36] Hukum ini juga yang menjadi salah satu penyebab air laut di bibir pantai tetap cair, meskipun salju dan air di tanah di sekitar pantai membeku pada saat musim dingin.

Adapun, contoh penerapan eksplanasi deduktif nomologis dalam ilmu ekonomi misalnya adalah dalam teori utilitas marjinal. Teori tersebut menyatakan bahwa makan sate kambing tiga porsi berturut-turut tidak akan lagi terasa nikmat, karena semakin banyak yang kita makan semakin kita merasa bosan, *ceteris paribus*.

Teori utilitas marjinal tersebut dinyatakan secara eliptik dalam skema E karena C, sehingga teori utilitas marjinal tersebut tidak mengeksplisitkan suatu hukum ekonomi dalam eksplanasinya. Namun, teori utilitas marjinal tersebut mengimplisitkan satu hukum ekonomi, yaitu *law of diminishing marjinal utility* (semakin banyak frekuensi konsumsi suatu komditas, maka tambahan nilai kepuasan yang diperoleh dari setiap satuan tambahan yang dikonsumsi akan menurun).

---

[36] Carl G. Hempel, *Philosophy of Natural Science*,,, h. 52.

Sehingga, teori utilitas tersebut memenuhi skema eksplanasi deduktif nomologis.

B. Causal *Laws*

Dalam perkembangannya, ilmu ekonomi tidak hanya mengadopsi eksplanasi berbasis hukum empiris semata, yaitu hukum yang dihasilkan dari digeneralisasi pengalaman empiris, seperti hukum *law of diminishing marjinal utility*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hausman, dalam ilmu ekonomi juga dikenal konsep *"causal laws"*. Karena obyek kajian ilmu ekonomi adalah perilaku manusia, sehingga *causal laws* ini bersifat mentalistik, yaitu bahwa "orang mengejar lebih banyak kekayaan".[37]

Ketika ada sebuah eksplanasi mengenai pilihan seseorang terhadap suatu produk yang menyatakan misalnya, "seseorang lebih memilih A ketimbang B, karena A lebih memilih murah daripada B". Eksplanasi eliptik tersebut mengimplisitkan *causal laws*, yaitu "manusia mengejar lebih banyak kekayaan".

---

[37] Daniel M. Hausman, *Tendencies, laws, and the composition of economic causes*, dalam Uskali Maki, *The Economic World View, Studies in the Ontology of Economics*, (Cambridge: Cambridge University press, 2001), h. 294.

Perilaku Seseorang yang memilih barang yang harganya lebih murah dalam contoh diatas merupakan konsekuensi dari *causal laws* bahwa "manusia mengejar lebih banyak kekayaan." Karenanya, eksplanasi berdasarkan *causal laws* ini masih termasuk ke dalam skema eksplanasi deduktif nomologis.

Eksplanasi berdasarkan *causal laws* inilah sebenarnya yang coba digambarkan oleh Dietrich dan List di atas. Di mana perilaku ekonomi dieksplanasikan sebagai konsekuensi dari *causal laws* yaitu kondisi mental tertentu (yang ditetapkan oleh seorang ekonom) ada pada diri pelaku ekonomi. Dalam contoh di atas kondisi mental yang ditetapkan adalah bahwa "orang mengejar lebih banyak kekayaan." *Causal laws* inilah yang nanti diformalisasi dalam konsep *homo economicus.*

Karena, eksplanasi (eksplanandum) merupakan konsekuensi dari hukum umum atau *causal laws,* maka eksplanasi ilmu ekonomi bersifat prediktif dengan modus "jika-maka". Eksplanasi seperti ini sebenarnya juga berlaku dalam bidang biologi, misalnya mengenai kelebatan daun. Dikatakan bahwa daun lebih lebat di sisi selatan pohon dari pada sisi utara

pohon karena pengaruh pancaran sinar matahari. Eksplanasi ini mengimplisitkan *causal laws* yaitu bahwa pohon memaksimalkan penerimaan cahaya matahari.

Namun, karena manusia tidak sama seperti pohon, yang selain menjadi produk dari proses evolusi yang kompleks, manusia juga menjadi produk dari proses pembelajaran historisnya.[38] Perilaku manusia tentu lebih kompleks dan dinamis, yang membuat perilaku manusia tidak dapat dijelaskan seperti menjelaskan perilaku partikel di laboratorium fisika. Karenanya, eksplanasi ilmu ekonomi selalu bergantung kepada klausul *ceteris paribus,* yang mengganggap variabel lain di luar analisis sebagai konstan.

Meskipun, eksplanasi merupakan konsekuensi dari hukum umum atau *causal laws,* yang harusnya bersifat niscaya. Namun, dalam kenyataannya tidak selamanya sesuai dengan konsekuensi hukum umumnya, karena ada faktor lain yang turut berpengaruh.

---

[38] Daniel Dennett, *Three Kinds of Intentional Psychology*, dalam Richard Boyd, Dkk., *The Philosophy of Science*, (Cambridge: The MIT Press, 1999), h. 642.

Seperti contoh di atas, tidak dapat dipastikan bahwa orang tersebut akan memilih barang A yang lebih murah, bisa saja ia memilih barang B meskipun harganya lebih mahal, karena desainnya lebih menarik baginya. Kondisi seperti inilah yang membuat eksplanasi ilmu ekonomi selalu bergantung pada klausul *ceteris paribus*, yang dalam contoh di atas menganggap faktor selain harga sebagai konstan.

Faktor Klausul *ceteris paribus* ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi membuat analisis analisis ilmu ekonomi sangat lemah, karena dalam kenyataan faktor-faktor lain tersebut turut berpengaruh alias tidak konstan. Sehingga, meskipun dikonsekuensikan dari hukum umum atau *causal laws*, dalam kenyataan eksplanasinya tidak bersifat pasti.

Namun, di lain sisi, penerapan klausul *ceteris paribus* memberi keuntungan metodologis, karena menghemat analisis. adalah dalam analisis regresi berganda.[39] Dalam analisis regresi berganda, sekalipun digunakan lebih dari satu variabel independen untuk memprediksi satu variabel dependen. Akan

---

[39] B. Herry Priyono, *Homo Economicus.* Dalam jurnal *Melintas, Vol. 33, No. 2.* h. 114.

tetap ada variabel independen yang tidak ter*cover*. Supaya lebih jelas, persamaan regresi berganda dengan empat variabel independen dituliskan sebagai berikut;

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_nX_n$$

Sekalipun kita mampu menganalisis variabel X_1, X_2, X_3, X_4 sebagai penyebab perilaku variabel Y. Namun masih akan ada variabel X_n yang berada di luar analisis, yang kita kita anggap *ceteris paribus*, meskipun sebenarnya dalam kenyataan variabel X_n turut berpengaruh terhadap perilaku variabel Y.

C. Homo Economicus

Umumnya, para ahli sepakat bahwa jejak konsep *homo economicus* dapat ditemukan dalam John Stuart Mill, kendati Mill tak secara eksplisit menyebut istilah *homo economicus* atau *economic man*, namun Mill dianggap sebagai orang yang pertama meletakkan prinsip-prinsip metodologis, yang sekarang kita kenal dengan *homo economicus.*[40] Jejak metodologis *homo economicus*

[40] Joseph Persky, *Retrospectives The Ethology of Homo Economicus*, dalam jurnal *Journal of Economic Perspectives—Vol. 9 No. 2*, 1995, h. 222.

itu tercermin dalam upaya Mill mendefinisikan istilah ekonomi-politik, kata Mill:

> *"ekonomi-politik bukanlah ilmu tentang politik spekulatif, tetapi suatu cabang dari ilmu pengetahuan. Tidak memperlakukan seluruh kodrat manusia sebagai dimodifikasi oleh keadaan sosial, ataupun seluruh perilaku dalam masyarakat. Ini mengenai ia sebagai makhluk yang ingin memiliki kekayaan. Dan yang mampu menilai keefektifan komparatif sarana untuk memperoleh itu. Ini hanya memprediksi fenomena seperti keadaan sosial sebagai akibat dari mengejar kekayaan."*[41]

Apa yang dikatakan Mill tersebut menunjukkan bahwa Mill yakin, fenomena sosial dapat diprediksi dengan menjadikannya sebagai konsekuensi dari asumsi mengejar kekayaan. Asumsi mengejar kekayaan dijadikan oleh Mill sebagai sebagai alat untuk menggeneralisasikan kompleksitas perilaku manusia menjadi ilmu ekonomi yang koheren.

---

[41] John Stuart Mill, *On the Definition and Method of Political Economy*, dalam Daniel M. Hausman (Peny.). *The Philosophy of Economics An Anthology*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), h. 41.

Hal tersebut nampak dalam ucapan Mill, “Bukan karena ekonom-politik begitu konyol dengan mengganggap manusia memang benar-benar demikian adanya (digerakkan oleh motif mengejar kekayaan), tapi karena ini adalah metode di mana sains harus berjalan.”[42] Generalisasi ini, bagi Mill adalah suatu tuntutan bagi ekonomi politik agar dapat memantapkan dirinya sebagai disiplin ilmu pengetahuan. Mill mengatakan:

> *“Perihal perilaku-perilaku manusia di mana kekayaan bukan obyek utamanya, politik ekonomi tidak berpretensi bahwa kesimpulannya dapat diterapkan. Tapi ada juga bagian tertentu dari kegiatan manusia, di mana pencapaian kekayaan adalah tujuan utama dan diakui. Hanya dalam bagian ini ekonomi-politik menaruh perhatian. Cara yang harus ditempuh ekonomi-politik adalah memperlakukan tujuan yang utama dan diakui itu sebagai satu-satunya tujuan.”*[43]

---

[42] John Stuart Mill, *On the Definition and Method of Political Economy*,,, h. 42.

[43] John Stuart Mill, *On the Definition and Method of Political Economy*,,, h. 42-43.

Jelas, bahwa Mill tidak mengganggap pengejaran kekayaan sebagai satu-satunya motif perilaku manusia. Pereduksian atau generalisasi perilaku manusia hanya sebagai pengejar kekayaan dilakukan oleh Mill, semata-mata demi kepentingan analisis ekonomi-politik.

Mill memang tidak menyebut secara eksplisit istilah *homo economicus*, namun jelas sekali bahwa konsep yang diajukan oleh Mill sebagaimana diuraikan tersebut merupakan fondasi atau konsep dasar mengenai apa yang sekarang kita kenal dengan istilah *homo economicus* dalam ilmu ekonomi konvensional.

Persky mengidentifikasi, istilah *homo economicus* atau *economic man* dalam bahasa inggrisnya pertama kali muncul dalam karya Ingram tahun 1888. Ingram sebenarnya mengkritisi konsep Mill yang dianggapnya tidak bertalian dengan manusia yang nyata melainkan manusia imajiner, yaitu manusia yang dipahami sebagai binatang pemburu uang.[44]

Seiring perkembangan ilmu ekonomi konvensional, menurut Pettit para ekonom secara universal menerima klaim

---

[44] Joseph Persky, *Retrospectives The Ethology of Homo Economicus*,,, h. 222.

keegoisan (*self-centredness*). Yaitu, klaim yang mengatakan bahwa orang melakukan apa mereka melakukannya sebagai hasil dari keinginan atau fungsi utilitas mereka sendiri. Mereka melakukannya tidak bertindak atas dasar keyakinan moral saja; masalah kepercayaan seperti itu dalam tindakan, hanya jika disertai dengan keinginan yang sesuai. Dan mereka tidak bertindak hanya atas dasar memahami apa yang diinginkan orang lain; keinginan seseorang seseorang atas sesuatu dapat mengarah pada tindakan hanya dengan adanya keinginan untuk memuaskan orang lain.[45]

Namun, selain klaim kegoisan tersebut para ekonom juga mengakui atau menerapkan preferensi atau kondisi mental lain sebagai berikut: (i) *Weak non tuism.* Inti dari klaim ini adalah bahwa keinginan orang keinginan orang tergantung pada bagaimana orang berperilaku dan apa yang terjadi pada orang lain. (ii) *Strong Non tuism*. Diklaim bahwa keinginan orang tidak memperluas, kecuali secara instrumental, kepada orang lain. Keinginan apa pun yang mereka miliki untuk apa yang orang lain

[45] Philip Pettit, *The Virtual Reality of Homo Economicus,,,* h. 76-77.

harus lakukan, atau untuk apa yang harus terjadi pada orang lain, pada akhirnya dimotivasi oleh keinginan untuk diri mereka sendiri. (iii) *Self regardingness.* Klaim keinginan non instrumental seseorang dapat saja meluas ke orang lain, dan mungkin mereka peka untuk merasakan keinginan orang lain. Atau orang relatif egois terhadap keinginan mereka.[46]

Para ekonom konvensional sebenarnya, tidak benar-benar mengganggap bahwa mengejar kekayaan adalah kondisi mental yang paling niscaya yang ada pada diri manusia. Mereka hanya memerlukan klaim tersebut sebagai dasar untuk menyusun hipotesis. Karenanya, dalam perspektif ilmu ekonomi konvensional, asumsi tidak bisa dinilai dari dirinya sendiri. Ketika dalam ilmu ekonomi konvensional manusia diasumsikan sebagai *homo economicus* yang mengejar kekayaan. Kita tidak bisa menilai asumsi tersebut salah dengan menunjukkan fakta bahwa banyak manusia yang beramal ikhlas karena kepercayaan pada agama dan tidak bermotif mengejar kekayaan sama sekali.

---

[46] Philip Pettit, *The Virtual Reality of Homo Economicus,,,* h. 76-77.

Bagi ekonom konvensional, argumen tersebut tidak relevan. Karena asumsi rasionalitas dan pengejaran kekayaan tersebut hanya diperlukan untuk menyusun hipotesis. Seperti yang dikatakan oleh Friedman "teori tidak dapat diuji dari realisme asumsinya." [47]

[47] Milton Friedman, *The Methodology of Positive Economics*, dalam Daniel M. Hausman (Peny.). *The Philosophy of Economics An Anthology*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), h. 159.